

	News Title : Regulasi Global Persulit Ekspor Sawit, Juni Bursa Berjangka Sawit Diluncurkan	
	Media Name : sawitku.id	Journalist : Tommy Pardede
	Publish Date : 07 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekbis	Topic : Bursa CPO

 Ekbis

Regulasi Global Persulit Ekspor Sawit, Juni Bursa Berjangka Sawit Diluncurkan

Tommy Pardede - Rabu, 7 Juni 2023 | 11:05 WIB



Mendag: Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Perdagangan di Bawah AANZFTA. (ANTARA)

SAWITKU-Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis kebijakan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka dapat hadir Juni 2023 seperti yang sudah ditargetkan.

Dalam pertemuan Konsultasi Publik Rancangan "Kebijakan **Ekspor CPO** Melalui Bursa Berjangka di Indonesia" di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin 6 Juni 2023.

Zulkifli mengatakan bahwa keberadaan **ekspor CPO** melalui bursa berjangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia.

Baca Juga: Selisih Harga Jomplang, Zulhas Minta BPK Audit Ulang Rafaksi Minyak Goreng

Baca Juga: Juni, Swedia Gelar Seks Sebagai Cabang Olahraga, Chemistry Pasangan Jadi Penilaian

"**Ekspor CPO** melalui bursa berjangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

Saat ini **ekspor CPO** masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi perekonomian global yang sedang melemah.

Karena itu diperlukan inovasi seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Baca Juga: Menkeu Sebut Pemerintah Tak Akan Gegabah Terapkan Pajak Karbon

Baca Juga: Sejumlah Negara Bagian AS Larang Peredaran Alkitab Versi LGBT

Menurut Zulkifli, hal ini diperlukan karena banyaknya aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional perlu juga memperkuat kebijakan ekspor Indonesia.

"Salah satunya melalui kebijakan **ekspor CPO** karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memiliki harga acuan sendiri.

Namun kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

Baca Juga: [Jadi tersangka, Siman Bahar Dicekal Bepergian ke Luar Negeri](#)

Baca Juga: [Lokananta, Tak Hanya Lorong Waktu Musik Indonesia, Ada Cerita Bola Disana](#)

Berkaitan dengan kebijakan tersebut diperlukan berbagai masukan agar **ekspor CPO** melalui bursa tidak merugikan pelaku usaha CPO.

Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali mewajibkan **ekspor CPO** melalui bursa berjangka.

"Kebijakan kewajiban pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga eksportir tetap wajib memiliki HE (harga eceran) terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengaturan **ekspor CPO** melalui bursa berjangka ini," ujarnya.